

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief Gosita, 2004, *Kumpulan Masalah-Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Viktimologi Pandangan Advokat*, CV Amerta Media, Jawa Tengah.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Islam*, Grahadika Press, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansyur dan Elisatsri Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fransiska Novita, dkk., 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Jubile Enterprise, 2012, *Chating Tanpa Batas Menggunakan WhatsApp*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maidina Rahmawati dan Nabila Saputri, 2022, *Jauh Panggan dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, PT. Sinar Grafika, Jakarta,.

Petter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

-----, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

-----, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, R.Sri Soemantri Martosoewignjo, S. Basah, B. Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, PJJ. van Buuren, F.A.M. Stroink, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta.

Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sajipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2022, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press.

Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Masukan Terhadap Perubahan UU NO. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban, Jakarta.

Siti R. A. Desyana dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* Internasional NGO Forum for Indonesia Development (INFID), Jakarta.

Widiartana, 2014, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban.

Republik Indonesia, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban.

### **C. Skripsi/Jurnal**

Arini Freya P. dan Tantimin, 2022, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum UIB*, 7 (1), 180.

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Dini Rahayu Utami, 2024, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Konten Pornografi Dan Perlindungan Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional*.

Deby Rahmatul Fitri, Pengaruh Victimblaming (Penyalahan Korban) Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Terhadap Proses Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8 (2), 11-12.

Evina Dwi Mayanti, 2023, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

- Fadhillah A., Fatma, R. Z., & Zihan, T. M. F., 2021, Kontruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6 (4), 793.
- Fadlun H. P., 2023, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Melibatkan Anak Dalam Kegiatan Pornografi, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso*.
- Faqi Rawni A. dan Jeferson Kameo, 2024, The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn, *Jurnal Alethea*, 8 (1), 78-79.
- Ghina Aslima Azzahra, 2023, Pertimbangan Hakim Dan Perlindungan Hukum Korban Dalam Putusan Kasus tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Pengancaman, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Galih Bagas Soesilo, 2021, Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia, *Jurnal Hukum UMPWR*, 57.
- Hwian Christianto, 2017, Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus Perspektif Sobural. *Jurnal Veritas et Justitia*, 3 (2), 3.
- Ita I.P.P., dkk, 2019, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, 8 (1), 462.
- Indra Lukman, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberporn (Kejahatan Pornografi), *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*.
- Jordy Herry Christian, 2020, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia, *Jurnal Binalmulia Hukum*, 9 (1), 90.
- Linda Agustina, 2022, Legal Standing Perempuan, Dalam Perkara Revenge Porn Perspektif Viktimologi. *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Lina Karlina dan Hasuri, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn), *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 4 (6), 2347-2348.
- Mahsun Ismail, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekomomi Syariah*, 1 (2), 118.
- Melisa dan Shentini Agustini, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Tindakan Cyberpornography, *Jurnal Gorontalo Law Review*, 5 (2), 512.

- Mohammad Nurul Huda, 2022, Korban dalam Perspektif Victimologi. *Jurnal Voice Justicia*, 6 (1), 68-69.
- Mursid Zuhri, 2009, Post Traumatic Stress Disorder (Gangguan Stress Pasca Trauma Bencana) Di Jawa Tengah, *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 7 (2), 141-150.
- Mutmainnah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor: 483/Pid.B/2019/PN.Amb), 2021, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Nabila Chandra A. dan Subekti, 2021, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Jurnal Recidive*, 10 (3), 167.
- Natasya Yadila, dkk., 2023, Tantangan Hukum Dalam Penegakkan UU ITE Terhadap Revenge Porn Di Era Digital, *Jurnal Fakultas Hukum UPN Veteran*, 12.
- Ni Nyomas P. T. A. dan I Ketut M., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn), *Journal Ilmu Hukum*, 9 (4), 59.
- Putri Salsadila, 2023, Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam Melalui Media Sosial. *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*.
- Putri Inka L., 2023, Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang, 2 (5), 2.
- Prianter Jaya H. dan Marfuahtul Latifah, 2023, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prianter, *Jurnal Negara Hukum*, 14 ( 2), 165.
- Rahmat H. A., 2019, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. *Jurnal Yustika*. 22 (1), 57.
- Ratu A. D. A. G., Nyoman G. S., & Ni M. S. K., 2021, Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2 (2), 261.
- Sandilliana Sarumaha, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatsapp (Studi Putusan: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn), *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
- Supriyanto, 2022, Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*.

Tiara Robiatul Adawiyah, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Yusuf Saefudin, 2023, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 23 (1), 26.

Zalzabila Armadani P.S., 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Jurnal*, Fakultas Hukum UNESA, (8) (1) 2

#### **D. Website**

Dua Tahun Disahkan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Masih Belum Punya Aturan Pelaksanaan, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/uu-tpks-hampir-2-tahun-diundangkan-peraturan-pelaksanaan-tak-kunjung-rampung>.

Jendela Hukum, *Download Ruu TPKS Yang Disahkan Menjadi UU*, <https://jendelahukum.com/download-ruu-tpks-yang-disahkan-menjadi-uu/>.

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenal*, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenal>.

Komnas Perempuan, *Siaran Pers*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks>.

National Library of Medicine, *Gangguan Stress Pasca Trauma*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559129/>.

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm tentang *Tindak Pidana Pornografi* [https://sipp.pn-lhokseumawe.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-lhokseumawe.go.id/index.php/detil_perkara).

Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum, <https://www.gamedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

[RILIS KOALISI], Catatan Krusial Terkait PP 29/2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://icjr.or.id/catatan-krusial-terkait-pp-29-2025-tentang-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>.

Refleksi 3 Tahun UU TPKS: Aturan Turunan Belum Lengkap, Implementasi Terhambat, <https://www.konde.co/2025/06/refleksi-3-tahun-uu-tpks-aturan-turunan-belum-lengkap-implementasi-terhambat/>.

Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>.